

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat secara global, menjadi pemain utama dalam perdagangan internasional dan sumber pendapatan krusial bagi banyak negara berkembang (UNWTO). Berbagai penelitian konsisten menunjukkan bahwa pariwisata memiliki dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Chiang et al., 2017; Tafel & Szolnoki, 2020). Di Indonesia, kemajuan sektor pariwisata sangat substansial, tercermin dari lonjakan 10 peringkat pada *Travel & Tourism Development Index* (TTDI) dari posisi 32 (2023) ke-22 (2024), menjadikannya negara ASEAN dengan lompatan terbesar dalam kurun 2019–2024 (Laporan Capaian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2024).

Provinsi Jawa Barat, dengan kekayaan warisan budaya serta keindahan alamnya, memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Pemerintah daerah pun telah menetapkan pariwisata sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dalam perencanaan pembangunan (RPJMN dan Rancangan Awal RPJMD Jawa Barat 2025–2029). Namun, realisasi potensi ini masih menghadapi tantangan kompleks. Perencanaan pembangunan seringkali belum responsif terhadap kebutuhan lokal, distribusi manfaat ekonomi belum merata, serta masih ditemui kompleksitas birokrasi dan miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat (Kusumah, 2024). Kebijakan dan rencana pembangunan pariwisata berkelanjutan seringkali masih pro-pertumbuhan dan fokus pada keuntungan ekonomi tradisional, tanpa sepenuhnya melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan (Ruhanen, 2013). Kondisi ini menghambat efektivitas implementasi program pariwisata yang diinisiasi pemerintah.

Mengingat semakin ketatnya persaingan antar destinasi dan kompleksitas pengelolaan pariwisata, kolaborasi dan kemitraan antar stakeholder telah menjadi prasyarat esensial bagi keberhasilan dan keberlanjutan sektor ini (Costa & Lima,

2018; Pramanik & Rahman, 2023). Dukungan stakeholder dipengaruhi oleh manfaat ekonomi yang dirasakan, pengetahuan pariwisata, kepercayaan terhadap pemerintah, serta kemampuan mereka memengaruhi aktor lain (Nunkoo & Gursoy, 2012). Keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sangat krusial karena memfasilitasi interaksi timbal balik dengan pemerintah, sektor swasta, dan wisatawan (Rasoolimanesh et al., 2017). Tanpa keterlibatan ini, pembangunan berkelanjutan berisiko menjadi sekadar wacana teoritis (Byrd, 2007). Oleh karena itu, memastikan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan adalah kunci untuk mengatasi hambatan dan mewujudkan potensi pariwisata yang berkelanjutan di Jawa Barat, di mana keberhasilan harus diukur tidak hanya dari dampak ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keutuhan budaya dan melestarikan lingkungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dukungan stakeholders kepada pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Meskipun penelitian mengenai pengaruh pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata telah banyak dilakukan, sebagian besar kajian yang ada masih bersifat umum dan seringkali masih berfokus pada satu dimensi atau aktor tunggal seperti penduduk tuan rumah (Gautam, 2023), wisatawan (Zhang et al., 2020) atau pelaku usaha saja (Khan et al, 2020, Wang et al., 2021) serta cenderung mengabaikan peran mediasi persepsi positif dan negatif dalam mempengaruhi dukungan stakeholder terhadap pemerintah.. Di Indonesia, penelitian yang menyoroti dinamika spesifik pemangku kepentingan pada tingkat daerah (kabupaten/kota atau provinsi) masih terbatas. Observasi menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pariwisata di tingkat daerah masih cenderung *top-down* dan kurang melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan lokal secara optimal.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami secara mendalam dinamika hubungan kompleks antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan pariwisata. Pemahaman ini krusial untuk merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata yang adaptif, kolaboratif, inklusif, berorientasi pada keberlanjutan, dan mendorong inovasi. Penelitian ini berargumen bahwa dukungan stakeholder terhadap pemerintah dalam

pengembangan pariwisata sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dukungan stakeholder melalui mediasi persepsi positif dan negatif, yang pada gilirannya menentukan efektivitas kebijakan pariwisata berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk mengeksplorasi secara komprehensif keterkaitan antara persepsi berbagai pemangku kepentingan (meliputi pelaku usaha, komunitas, akademisi, dan masyarakat) dengan bentuk dukungan mereka terhadap kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata daerah. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengadopsi pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan faktor-faktor dukungan stakeholder secara terintegrasi seperti keterlibatan, sikap budaya, persepsi manfaat ekonomi, dan kepercayaan terhadap pemerintah serta menelaah mekanisme mediasi kognitif-afektif berupa persepsi positif dan negatif terhadap pembangunan pariwisata, sebagaimana disarankan oleh Rasoolimanesh et al. (2022) dan Nunkoo (2020) dalam model-model keterlibatan stakeholder yang lebih kompleks dan kontekstual. Studi ini juga kontekstual secara spasial dan kebijakan karena mengambil fokus pada tingkat provinsi, yakni Jawa Barat, yang memiliki kompleksitas tata kelola dan keberagaman pemangku kepentingan lokal. Kebaruan pendekatan regional ini selaras dengan temuan Saito & Ruhanen (2021) yang menekankan pentingnya pendekatan tempat-spesifik (*place-based approach*) dalam kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pemodelan hubungan stakeholder dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, tetapi juga menyumbang wawasan praktis bagi perumusan kebijakan berbasis partisipasi di tingkat daerah. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor dukungan stakeholder terhadap dukungan kepada pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Jawa Barat, dengan mempertimbangkan peran mediasi dari persepsi positif dan negatif stakeholder.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan kebaruan yang ditawarkan, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor dukungan stakeholder pariwisata memengaruhi persepsi positif dan negatif terhadap pengembangan pariwisata?
2. Bagaimana persepsi positif dan negatif stakeholder memengaruhi dukungan mereka terhadap pemerintah dalam pengembangan pariwisata?
3. Bagaimana faktor-faktor dukungan stakeholder pariwisata secara langsung memengaruhi dukungan terhadap pemerintah dalam pengembangan pariwisata?
4. Apakah persepsi positif dan negatif memediasi pengaruh faktor-faktor dukungan stakeholder pariwisata terhadap dukungan terhadap pemerintah dalam pengembangan pariwisata?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh faktor-faktor dukungan stakeholder pariwisata terhadap persepsi positif dan negatif terkait pengembangan pariwisata.
2. Menguji pengaruh persepsi positif dan negatif stakeholder terhadap dukungan mereka terhadap pemerintah dalam pengembangan pariwisata.
3. Menganalisis pengaruh langsung faktor-faktor dukungan stakeholder pariwisata terhadap dukungan terhadap pemerintah dalam pengembangan pariwisata.
4. Mengetahui apakah persepsi positif dan negatif memediasi pengaruh faktor-faktor dukungan stakeholder pariwisata terhadap dukungan terhadap pemerintah dalam pengembangan pariwisata.

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan baru tentang bagaimana pemerintah dan stakeholders dapat bekerja sama secara efektif dalam pengembangan pariwisata. Penelitian ini juga berfungsi sebagai dasar untuk

merancang intervensi dan program pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders, serta untuk mengoptimalkan partisipasi dan kontribusi mereka dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah terutama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi studi, serta pemerintah daerah lainnya secara lebih luas dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan perspektif serta dukungan dari berbagai stakeholder.